

Laporan Penelitian
KELOMPOK

**PERAN POLITIK MAHASISWA
DALAM MEMPERJUANGKAN
ASPIRASI MAHASISWA :**
(Studi Kasus Partai Politik Mahasiswa
di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)



Tim Peneliti :

Ainul Yaqin, M.Ed.
Drs. M. Rifa'i Abduh, M.A.
Zainal Anwar, S.H.I

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007



DEPARTEMEN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 550776, Fax. (0274) 550776 Yogyakarta 55281
e-mail : lemlit_uin@telkom.net

SURAT REKOMENDASI

Nomor : UIN 02/KLP/TL.03/171.a/2007

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, menerangkan bahwa :

Nama : Ainul Yaqin, M.Ed.
NIP. : 150259419
Jabatan : Ketua Tim Peneliti/Anggota CRSD UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

telah melakukan kegiatan *Penelitian Kelompok* mulai bulan Juni s.d. Nopember 2007 dengan judul :

**Peran Politik Mahasiswa dalam Memperjuangkan Aspirasi Mahasiswa :
(Studi Kasus Partai Politik Mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)**

Laporan Hasil Penelitian tersebut sudah memenuhi syarat sebagai hasil penelitian ilmiah.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 Nopember 2007



Ketua,
Drs. H. Fuad, M.A.
NIP. 150228207 p

ABSTRAK

Salah satu ciri menonjol pasca runtuhnya kekuasaan orde baru adalah terjadinya liberalisasi politik. Di level kampus, liberalisasi itu berwujud pada kehendak mendirikan partai politik mahasiswa. Sebuah semangat berpolitik yang datang kembali muncul setelah lama dibungkam rejim Soeharto. Jika selama ini mekanisme suksesi presiden mahasiswa lebih banyak diperankan institusi rektorat, terutama dengan kuasa pembantu rektor III, hal itu kini sudah tidak terjadi lagi.

Hal ini paling tidak bisa dilihat di kalangan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pasca runtuhnya orde baru, pemilihan anggota senat mahasiswa hingga presiden mahasiswa dilakukan dengan suatu mekanisme yang disebut pemilihan umum mahasiswa (Pemilwa). Untuk bisa menduduki jabatan politik tertentu, seperti presiden mahasiswa atau ketua senat, seseorang harus melalui institusi yang disebut parpol.

Pasca tahun 1998, partai politik mahasiswa banyak muncul dan berkembang di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Inilah era baru gerakan mahasiswa pasca tumbanganya Soeharto. Sebuah rejim yang pernah memberangus semangat berpolitik mahasiswa lewat kebijakan NKK/BKK tahun 80-an.

Tulisan ini berupaya mendeskripsikan partai politik mahasiswa dan bagaimana mereka bekerja untuk kepentingan mahasiswa.

ABSTRACT

One of the political characteristics in the post Soeharto's regime is political liberalization. In campus level, the liberalization has been formed on creating student political parties, after Soeharto's regime stifled student movements for long time. If in the Soeharto's regime the mechanism of student leadership election was performed by the head of university and the office of university head, especially by the power of the third assistant of the head of university, it does not work any more nowadays.

Those phenomena can be seen in the State Islamic University (UIN) of Sunan Kalijaga Yogyakarta today. In the post Soeharto's regime, the election to select the members of student senate and the student president has held through a mechanism called the general election of student (Pemilwa). If a student wants to take one position, like the student president or the chair of senate, she/he has to be proposed by a political party.

After 1998, many student political parties come up and grow in UIN of Sunan Kalijaga Yogyakarta. It is the new spirit of student movements in the post Soeharto's regime which stifled the political spirit of student movements through the NKK-BKK policy.

This paper will discuss the student political parties and how they work for students.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Kegunaan
- D. Tinjauan Pustaka
- E. Landasan Teori
- F. Metode Penelitian

BAB II Sistem Pemilu di UIN dan Profil Partai Politik Mahasiswa

- A. Sistem Pemilu
 - a. Landasan mahasiswa berpolitik
 - b. Regulasi Pemilu
- B. Profil Partai
 - a. Partai Rakyat Merdeka (PRM)
 - 1) Proses Pembentukan Partai
 - 2) Asas dan Tujuan
 - 3) Basis sosial anggota
 - 4) Mekanisme pengambilan Keputusan
 - 5) Pola Kaderisasi
 - b. Partai PAS
 - 1) Proses Pembentukan Partai
 - 2) Asas dan Tujuan
 - 3) Basis sosial anggota
 - 4) Mekanisme pengambilan Keputusan
 - 5) Pola Kaderisasi
 - c. Partai Aliansi Demokrat
 - 1) Proses Pembentukan Partai
 - 2) Asas dan Tujuan
 - 3) Basis sosial anggota
 - 4) Mekanisme pengambilan Keputusan
 - 5) Pola Kaderisasi

- d. Partai Proletar
 - 1) Proses Pembentukan Partai
 - 2) Asas dan Tujuan
 - 3) Basis sosial anggota
 - 4) Mekanisme pengambilan Keputusan
 - 5) Pola Kaderisasi
- e. Partai Pencerahan
 - 1) Proses Pembentukan Partai
 - 2) Asas dan Tujuan
 - 3) Basis sosial anggota
 - 4) Mekanisme pengambilan Keputusan
 - 5) Pola Kaderisasi

BAB III Genealogi Aktivistis Partai Politik Mahasiswa

- A. Basis pendidikan
- B. Praktek wacana
- C. Ruang publik
- D. Kontestasi politik

BAB IV Peran Parpol Mahasiswa dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik

- A. Proses penyerapan aspirasi publik di UIN
- B. Proses perumusan aspirasi publik di UIN
- C. Aspirasi Publik sebagai Platform dan Agenda Politik Partai
- D. Strategi Parpol Mahasiswa dalam memperjuangkan aspirasi publik sebagai Kebijakan Publik di UIN

BAB V Penutup

- A. Simpulan
- B. Saran

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu ciri menonjol pasca runtuhnya kekuasaan orde baru adalah terjadinya liberalisasi politik. Seperti diketahui, lanskap politik era transisi Indonesia dihidupkan oleh gelora euforia reformasi yang melanda hampir seluruh lapisan masyarakat.¹ Salah satu fakta penting terkait liberalisasi politik adalah bertumbuh-kembangnya partai politik (parpol) baru dalam setiap Pemilihan Umum (Pemilu).

Uniknya, fenomena tersebut tidak hanya terjadi di aras perpolitikan nasional. Di level kampus, semangat berpolitik kembali muncul. Jika selama ini mekanisme suksesi presiden mahasiswa lebih banyak diperankan institusi rektorat, terutama dengan kuasa pembantu rektor III, hal itu kini sudah tidak terjadi lagi.

Hal ini paling tidak bisa dilihat di kalangan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pasca runtuhnya orde baru, pemilihan anggota senat mahasiswa hingga presiden mahasiswa dilakukan dengan suatu mekanisme yang disebut pemilihan umum mahasiswa (Pemilwa). Untuk bisa menduduki

¹ Munafrizal Manan, *Gerakan Rakyat Melawan Elite*, (Yogyakarta: Resist Book, 2005), hlm. 103.

jabatan politik tertentu, seperti presiden mahasiswa atau ketua senat, seseorang harus melalui institusi yang disebut parpol.

Sistem pemilu dan parpol yang dipakai di UIN ini memang mengadopsi sistem Pemilu dan parpol di Indonesia. Untuk bisa mendirikan Parpol, mahasiswa harus bisa mengumpulkan sekelompok orang, merumuskan visi-misi, melengkapi struktur kepengurusan, dan membentuk kepengurusan di tingkat fakultas dan jurusan.

Dalam konteks tersebut, peran parpol tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebagai institusi demokrasi, secara teoretis, ia bisa menghidupkan demokrasi di aras kampus. Organisasi kekuasaan ini juga bisa berperan sebagai institusi yang mengkonsolidasikan massa. Selain itu, ia juga berpotensi “membunuh” demokrasi, mengobral janji atau menjadi organisasi yang justru melindungi *status quo*.

Pada era reformasi ini, peran parpol di kampus menjadi penting dan menarik diperbincangkan. Selain menjadi institusi yang bisa mengantarkan seseorang untuk menduduki jabatan politik, sesuai fungsinya, parpol juga ikut berjuang menggali, merumuskan dan memperjuangkan aspirasi atau kepentingan mahasiswa.

Selama ini, fungsi parpol untuk memperjuangkan aspirasi mahasiswa inilah yang masih belum menonjol. Boleh jadi, hal ini terpengaruh oleh

kebijakan pemerintah orde baru yang melarang mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan politik kampus maupun kebijakan kampus.

Hal ini tentu membuncahkan sebuah pertanyaan, adakah peluang bagi parpol untuk menjalankan dua fungsi utamanya, yakni artikulasi dan agregasi kepentingan? Tentu ini sangat terbuka. Dalam pandangan Ramlan Surbakti, begawan ilmu politik dari Unair Surabaya, parpol merupakan sarana pengorganisasian warga negara (dalam konteks kampus adalah mahasiswa) yang mendorong anggotanya untuk bersama-sama memperjuangkan dan mewujudkan negara dan masyarakat yang dicita-citakan.²

Dalam konteks tersebut, parpol menjadi media atau sarana partisipasi mahasiswa dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik di level kampus dan dalam penentuan siapa yang menjadi penyelenggara pemerintahan mahasiswa pada berbagai lembaga politik di kampus.³ Purwo Santoso menilai, secara yuridis maupun faktual, parpol menjadi penentu nasib orang banyak melalui kebijakan-kebijakan publik yang dibuat dan dikendalikannya dalam lembaga perwakilan rakyat.⁴

Salah satu fakta menarik dalam mengkaji parpol di dunia kampus adalah melihat kinerja parpol mahasiswa dalam berkomunikasi dengan para

² Ramlan Surbakti, "Apakah Partai-Partai sudah ada di Indonesia?" dalam *K ompas*, 5 Agustus 2002.

³ *Ibid.*

⁴ Purwo Santoso, "Kompetensi Partai Politik Sebagai Pelaku Kebijakan Publik" dalam Pradjarta DS dan Nico L. Kana, penyunting, *Demokrasi dan Potret Lokal Pemilu 2004*. (Yogyakarta: Percik Salatiga dan Pustaka Pelajar, Juli 2006), hlm. 34.

mahasiswa atau konstituennya dalam memperjuangkan aspirasi atau kepentingan mahasiswa, baik di level kebijakan kampus atau di tingkat rektorat.

Dari paparan tersebut, penelitian ini ingin menelusuri bagaimana kinerja parpol mahasiswa, apa saja ideologi yang memengaruhinya dalam memperjuangkan kepentingan atau aspirasi mahasiswa. Bagaimana strategi parpol tersebut dalam memperjuangkan kepentingan konstituen atau mahasiswa secara umum, serta siapa saja pihak yang dilibatkan atau diajak berkoalisi dalam upaya mencapai tujuan partai. Riset ini juga akan membedah visi-misi, program, ideologi dan tujuan partai.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan eksplorasi persoalan di atas, rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana aktivis parpol mahasiswa dalam menyerap dan merumuskan aspirasi mahasiswa? Bagaimana proses tersebut dilakukan?
2. Bagaimana strategi dan peran aktivis parpol mahasiswa dalam memperjuangkan aspirasi publik di level kebijakan pemerintahan mahasiswa?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Penyusun membahas kajian tentang parpol mahasiswa dengan beberapa tujuan dan kegunaan.

Tujuan dari kajian ini adalah:

1. Untuk mengungkap kinerja Parpol Mahasiswa terkait dengan fungsinya sebagai parpol, terutama fungsi artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan dan sosialisasi politik;
2. Untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa dilibatkan, terutama anggota dan konstituen partai terkait, dalam perumusan kebijakan parpol yang selanjutnya akan diperjuangkan menjadi kebijakan publik;
3. Untuk mengetahui apa dan bagaimana parpol memperjuangkan kebijakan publik yang telah diamanatkan kepadanya, dan siapa saja yang diajak berkoalisi untuk mencapai tujuan tersebut.

Kegunaan dari kajian ini memiliki signifikansi akademis dan praktis sekaligus, yaitu;

1. Secara akademis, kajian ini akan berupaya menjadi studi awal wacana peran politik mahasiswa dalam formulasi kebijakan publik dalam konteks pemerintahan mahasiswa. Kajian ini juga berikhtiar menyingkap strategi parpol dalam memperjuangkan sebuah kebijakan publik, terutama dari sisi internal pemerintahan;
2. Secara praktis, kajian ini berupaya meletakkan pijakan keterlibatan mahasiswa dalam formulasi kebijakan publik melalui parpol mahasiswa.

D. TELAAH PUSTAKA

Dari penelusuran yang dilakukan penyusun, studi tentang parpol mahasiswa belum banyak disentuh, untuk dikatakan belum ada. Studi tentang mahasiswa yang dilakukan adalah: Abdul Munip tentang "*Dinamika Organisasi Mahasiswa ekstra Kampus di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga*", Koeswinarno tentang "*Membangun Citra Mahasiswa UIN Yogyakarta: Sebuah Renungan Subyektif*", dan Muh. Syamsuddin tentang "*Dinamika Organisasi Ekstra Kampus di Tengah Pergulatan Ideologi*". Penelitian tersebut secara eksploratif membahas tentang aktivitas organisasi kemahasiswaan, sedangkan pada penelitian ini akan di ungkap peranannya dalam politik kampus yang tercermin dalam partai-partai politik, sebagai metamorfosis dari organisasi mahasiswa di UTN Sunan Kalijaga. Hal ini lah yang secara fundamental membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

E. KERANGKA TEORI

1. Partai Politik dan Kebijakan Publik; Kerangka Konseptual

a. Partai Politik dan Demokratisasi

Parpol merupakan instrumen penting dalam demokrasi. Huntington menilai, dalam beberapa hal, parpol menjadi begitu penting sebagai sarana

mengorganisir dan menata perluasan partisipasi.⁵ Sedangkan Diamond menandakan, parpol merupakan kerangka kerja kelembagaan yang sangat penting bagi perwakilan dan pemerintahan dalam sebuah demokrasi.⁶

Bagi Diamond, parpol dapat memajukan demokrasi ketika anggotanya memiliki pemahaman yang rasional tentang program atau misi mereka; ketika mereka semakin kompleks baik secara horisontal dalam ruang lingkup fungsi-fungsi dan berbagai sub unit khususnya, maupun secara vertikal dalam jangkauan ke tingkat warga negara; dan ketika mereka telah membangun kemandirian dari lembaga negara lainnya dan dari pusat-pusat kekuasaan sosial-politik. Jika kondisinya demikian, Diamond optimis parpol akan efektif. Sebagai tambahan, mereka bisa beradaptasi dengan perubahan, mengembangkan spesialisasi fungsional baru, mengembangkan kepedulian yang substansial, membangun kemampuan teknis, dan menyertakan kelompok-kelompok yang baru tumbuh.⁷

b. Partai Politik dan Kebijakan Publik

Dalam konteks formulasi kebijakan publik, peran parpol seringkali diabaikan dan dianggap biang penyebab kekacauan dalam proses

⁵ Samuel P. Huntington, *Tertib Politik Di tengah Pergeseran Massa*. Penerjemah; Sahat Simamora, (Jakarta; P.T. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 473.

⁶ Larry Diamond, *Developing Democracy*, hlm. 116.

⁷ Larry Diamond, *Developing Democracy*, hlm. 116-117

kebijakan publik. Sementara anggapan normatif yang menyatakan bahwa parpol sebagai instrumen yang memperlancar proses kebijakan publik demokratik menjadi sering tertolak. Harapan rakyat seringkali terkorbankan demi kepentingan segelintir oknum makelar kekuasaan.⁸

Sementara jika kebijakan yang diberlakukan oleh partai pemenang pemilu menceminkan apa yang telah mereka janjikan sebelum pemilu, maka ini menunjukkan bahwa pemilih telah menetapkan sebuah pilihan. Dan pilihan rakyat inilah yang telah menciptakan perbedaan antara partai satu dengan yang lainnya. Ini menempatkan parpol sebagai aktor utama yang menghubungkan rakyat dengan pemerintah. Parpol menangkap kehendak rakyat dari berbagai media, lalu mengubahnya menjadi sebuah agenda politik partai setelah disesuaikan dengan garis ideologinya.⁹

Pada dasarnya, para politisi bisa menikmati posisi penting dalam birokrasi, terutama lewat pemilihan langsung. Disinilah parpol memainkan peranan krusial dalam pengambilan keputusan dan implementasinya. Pada titik inilah parpol menjadi garda depan dalam demokrasi, serta menjadi kekuatan perekat kesenjangan politik yang ada pada relasi negara-rakyat yang selama ini terjadi disparitas. Dalam konteks ini, tugas awal parpol sebagai pengemban misi demokratik dalam kebijakan publik dimulai.¹⁰

⁸ Fadillah Putra, *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*, Cet. II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar; Juni 2003), hlm. 77.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 77-78.

BAB IV

Peran Parpol dalam Proses Kebijakan Publik

Dalam konteks pembuatan kebijakan publik di lingkup kampus, peran partai politik mahasiswa sebetulnya sangat penting. Hanya saja sampai sekarang belum begitu terasa gregetnya. Berikut ini akan dipaparkan bagaimana sebetulnya partai politik yang dibentuk mahasiswa berupaya menyerap, merumuskan dan memperjuangkan aspirasi mahasiswa.

A. Proses penyerapan aspirasi publik di UIN

Partai Rakyat Merdeka (PRM) dalam melakukan penjangkaran aspirasi ke mahasiswa melalui pendekatan-pendekatan ke basis konstituen. Strategi yang dilakukan adalah dengan polling anggota, melalui forum diskusi, tongkrongan kultural dengan membahas problem-problem mahasiswa. Proses perumusan aspirasi dilakukan dengan cara, gerak di lapangan kemudian di diskusikan ke seluruh kader partai dan kemudian dirumuskan.

Strategi partai politik mahasiswa dalam memperjuangkan aspirasi publik dilakukan dengan cara menjadikannya dalam program kerja, diintegrasikan, menyempurnakan demokrasi prosedural, dilakukan melalui lembaga mahasiswa, *student government*.

Strategi Partai PAS dalam pembuatan kebijakan publik dilakukan melalui proses penjangkaran aspirasi mahasiswa melalui silaturahmi akbar

dengan mengundang seluruh elemen mahasiswa. Dalam acara tersebut diundang kader-kader partai PAS, pengurus partai dan mahasiswa umum.

Aspirasi yang telah ditampung kemudian disampaikan kepada pihak bersinggungan dengan kebijakan yang dimaksud. Selain itu partai PAS juga melakukan proses komunikasi dengan melakukan silaturahmi dengan partai lain untuk menyampaikan aspirasi yang berhasil mereka tampung. Dalam silaturahmi tersebut, partai PAS sekaligus memperbincangkan tawaran solusi yang akan dilakukan.

Untuk menjangkau aspirasi ke mahasiswa secara umum, Salman mengakui sebagai presiden partai PAD belum pernah melakukan. Untuk mengetahui apa kira-kira aspirasi mahasiswa, PAD hanya melakukan analisis dan pembacaan situasi kampus secara subyektif.

Salman bercerita bahwa dulu pernah dilakukan penarikan angket yang ditangani oleh departemen litbang PAD. Setelah angket disebarkan, lalu dibahas di tingkat DPP dengan mengundang seluruh jajaran partai untuk mendiskusikannya.

Salman menegaskan, proses penyerapan aspirasi kepada para mahasiswa di kampus boleh dikatakan belum terlalu banyak dilakukan.

Berkaitan dengan kinerja PAD, menurut Salman, mungkin baru sebatas kader-kader riil dari IMM dan PAD sendiri.¹

Namun demikian, PAD bukannya tidak berupaya menjaring aspirasi para mahasiswa. Salman menuturkan bahwa sebelum pemilu, proses penjaringan aspirasi itu tetap dilakukan. Untuk tingkat pusat, DPP mengundang jajaran DPP, DPW tiap fakultas dan ketua-ketua komisariat IMM untuk melakukan penjaringan aspirasi menghadapi pemilu mendatang.

Dalam proses penyerapan aspirasi di kampus, PAD memperkuat konsolidasi internal, terutama untuk membicarakan sikap-sikap partai. Setelah dirasa maksimal, baru kemudian melakukan proses penjaringan aspirasi keluar. Yang jelas, PAD menempuh jalan musyawarah.

Salman menegaskan bahwa yang terlibat dalam proses penjaringan aspirasi adalah tingkat internal terlebih dahulu dengan melibatkan semua komponen partai mulai dari tingkat paling bawah. Yang dimaksud internal adalah para elit DPP beserta jajaran departemen-departemennya, DPW serta IMM dan juga MPP (Majelis Pertimbangan partai) sebagai dewan konsultatifnya.

Secara rutin, kata Salman, PAD melakukan pertemuan rutin untuk melakukan pembacaan situasi politik, terutama peta politik yang berkembang.

¹ Wawancara dengan Salman Sayuthi, Yogyakarta, 14 September 2007 di basecamp IMM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Informasi dari Salman pada bab ini berdasarkan wawancara pada tanggal tersebut.

Pertemuan rutin ini tidak selalu dilakukan secara formal. Terkadang justru menggunakan forum-forum kultural antara Presiden partai dan departemen ataupun dengan MPP. Pertemuan ini sendiri tidak dijadwalkan secara rutin.

Sementara itu, dalam hal menyerap aspirasi mahasiswa, sebagai dijelaskan Wasis, Partai Proletar memiliki forum strategis internal. Dari forum tersebut dilakukan pembacaan tentang situasi kampus untuk melihat kebutuhan mahasiswa. Ia juga mengatakan bahwa platform partai berawal dari sini.²

Dalam hal pola menjaring aspirasi, wasis mengaku masih sebatas melalui rapat dan diskusi saja. Ia mengakui bahwa Partai Proletar memiliki divisi litbang tapi kurang bekerja maksimal. Ia sempat pernah mau mengadakan polling tentang partai kampus tapi belum sempat terlaksana.

Terkait siapa saja yang dilibatkan atau diundang dalam proses penyerapan aspirasi tersebut, Wasis menjelaskan sebatas kader-kader dan pengurus partai mulai dari tingkat universitas, fakultas dan jurusan.

Dalam hal menyerap aspirasi mahasiswa, Ahmad Muhibbin, Presiden Partai Pencerahan, menjelaskan bahwa pada tahapan awalnya dilakukan

² Wawancara dengan Muadin Wasis pada 23 September 2007 di Pondok Pesantren Budi Mulia, Jl. Kaliurang K.M 9 Yogyakarta. Informasi dari Wasis pada bab ini berdasarkan wawancara pada tanggal tersebut.

diskusi internal termasuk dengan pengurus HMI. Ahmad menerangkan bahwa ini karena afiliasi partainya dengan HMI.³

Setelah itu, baru kemudian disusul dengan diskusi-diskusi dengan elemen gerakan lainnya. Dari rangkaian diskusi tersebut, biasanya akan diperoleh poin-poin tentang persoalan mahasiswa yang selanjutnya menjadi semacam platform perjuangan.

Terkait pola menjaring aspirasi, mekanisme yang dijalankan partai pencerahan biasanya dengan menyamakan cara pandang dulu dengan segenap jajaran internal partai. Setelah itu, kata Ahmad, baru dikonsolidasikan dengan berbagai elemen melalui forum diskusi. Ia mengaku belum pernah melakukan survey. Dalam pertemuan yang dipakai untuk menyerap aspirasi, biasanya melibatkan seluruh pengurus, kader dan simpatisan.

Sementara itu, Partai Proletar memiliki forum strategis internal. Dari forum tersebut dilakukan pembacaan tentang situasi kampus untuk melihat kebutuhan mahasiswa. Ia juga mengatakan bahwa platform partai berawal dari sini.

Dalam hal pola menjaring aspirasi, wasis mengaku masih sebatas melalui rapat dan diskusi saja. Ia mengakui bahwa Partai Proletar memiliki

³ Wawancara dengan Ahmad Muhibbin pada 31 Oktober 2007 di Student center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Informasi dari Ahmad Muhibbin pada bab ini berdasarkan wawancara pada tanggal tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Dari penelitian ini simpulan yang dapat dijabarkan adalah:

1. Partai-partai politik kampus UIN Sunan Kalijaga (PRM, PAS, PAD, Partai Proletar, dan Partai Pencerahan) mempunyai peran strategis dalam mendidik dan mendewasakan mahasiswa dalam berpolitik kampus. Forum politik kampus dilaksanakan dalam sebuah pesta demokrasi yang bernama Pemilwa (Pemilihan Umum Mahasiswa).
2. Landasan yuridis yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Mahasiswa adalah *Pertama*, undang-undang republik mahasiswa UIN Sunan Kalijaga nomor 23 Tahun 2006 tentang Pemilihan Umum Anggota Senat Mahasiswa Universitas, Anggota Senat Mahasiswa Fakultas, ketua dan wakil ketua BEM-F, BEM-J, BEM-PS, serta Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa. *Kedua*, Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta nomor 100.d. Tahun 2006 tentang Petunjuk pemilihan umum mahasiswa (pemilwa).
3. Dalam memperjuangkan aspirasi mahasiswa dan pembuatan kebijakan publik partai-partai kampus melakukan dengan langkah-langkah melakukan analisis dan pembacaan situasi kampus, mengundang jajaran pengurus-pengurus partai, dan mahasiswa umum untuk melakukan

penjaringan aspirasi. Setelah aspirasi diperoleh kemudian dilanjutkan pembicaraan di tingkat pimpinan pusat partai. Setelah aspirasi mahasiswa didapatkan kemudian dalam mekanisme politik diperjuangkan dalam konstitusi dan kebijakan-kebijakan kampus melalui lembaga-lembaga kemahasiswaan

B. SARAN-SARAN

Saran-saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah:

1. Pesta demokrasi yang dilaksanakan oleh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga berupa Pemilihan Umum Mahasiswa (Pemilwa) hendaknya lebih memperhatikan dan mentaati mekanisme dan aturan yuridis yang menjadi kesepakatan bersama. baik mahasiswa, partai politik kampus, lembaga kemahasiswaan dan birokrasi kampus.
2. Penegakkan hukum dan pemberlakuan sanksi bagi pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan umum mahasiswa adalah hal yang penting sebagai bagian dari terciptanya iklim demokrasi di kampus putih
3. Setiap usulan mahasiswa melalui mekanisme partai politik kampus harus dikawal sampai terwujud kebijakan-kebijakan yang diperjuangkan. Tidak cukup hanya memberikan masukan dan draft kebijakan.

Daftar Pustaka

- Ali Said Damalik, *Fenomena Partai Keadilan, ransformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, Jakarta: Teraju, 2003
- Arief Budiman, "Mengkaji Gerakan Pro-Demokrasi di Indonesia," kata pengantar dalam Arief Budiman dan Olle Tornquist, *Aktor Demokrasi; catatan tentang gerakan perlawanan di Indonesia*, Jakarta: ISAI, 2001
- Arie Sujito, "Mahasiswa Kini Tercerabut dari Akar Sosialnya", *Kedaulatan Rakyat*, 19 Februari 1995.
- Arie Sujito, "SMPT Lembaga Manajerial Mahasiswa", *Bernas*, 26 Desember 1996.
- Arie Sujito dan Bambang Hidayana, *Krisis Kepemimpinan Bangsa di Mata Mahasiswa*, Yogyakarta: Philosophy Press, 2001
- Muridan S. Widjojo, dkk., *Penakluk Rezim Orde Baru; Gerakan Mahasiswa '98* Jakarta: Sinar Harapan, 1999
- Edwad Aspinal, *The Indonesia Student Uprising of 1998*.
- Munafrizal Manan, *Gerakan Rakyat Melawan Elite*. Yogyakarta: Resist Book, 2005
- Nur Kholik Ridwan, *Santri Baru Pemetaan. Wacana Ideologi dan Kritik*, Yogyakarta: Gerigi, 2004
- Ramlan Surbakti, "Apakah Partai-Partai sudah ada di Indonesia?" dalam *K ompas*, 5 Agustus 2002.
- Purwo Santoso, "Kompetensi Partai Politik Sebagai Pelaku Kebijakan Publik" dalam Pradjarta DS dan Nico L. Kana, penyunting, *Demokrasi dan Potret Lokal Pemilu 2004*, Yogyakarta: Percik Salatiga dan Pustaka Pelajar, Juli 2006
- Samuel P. Huntington, *Tertib Politik Di tengah Pergeseran Massa*, Penerjemah; Sahat Simamora, Jakarta; P.T. Raja Grafindo Persada, 2003
- Larry Diamond, *Developing Democracy*, hlm. 116.
- Fadillah Putra, *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar; Juni 2003
- Francois Railon, *Politik dan Idiologi Mahasiswa Indonesia; Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974*, LP3S, Jakarta, 1986.

Purwo Santoso, "*Kompetensi Partai Politik Sebagai Pelaku Kebijakan Publik: Kasus Kota Yogyakarta*," dalam Pradjarta DS dan Nico L. Kana (Penyunting), *Demokrasi dan Potret Lokal Pemilu 2004*, Salatiga, Pustaka Percik bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, Juli 2006

Robert E. Stake, "*Case Studies*", dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (eds.), *Handbook of Qualitative Research*, London: Sage Publication, 1994

Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda, 1990

Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, alih bahasa oleh Nuktah Arfawie Kurde, dkk., Yogyakarta: Fak. Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda dan Pustaka Pelajar, 1997

www.hmibecak.files.wordpress.com. *up date* 6 september 2007.

Prisma, Juli 1996.

www.hmibecak.files.wordpress.com. *up date* 6 september 2007.

www.hmibecak.files.wordpress.com. *up date* 6 september 2007.

Majalah *ARENA* Edisi III/h. XXVI/2000

**ANGGARAN DASAR
PARTAI RAKYAT MERDEKA
(PRM)
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**BAB I
Nama, Waktu dan Kedudukan**

Pasal 1

Organisasi ini bernama Partai Rakyat Merdeka.

Pasal 2

Partai Rakyat Merdeka didirikan di Yogyakarta pada tanggal 24 April 2000 Masehi bertepatan dengan tanggal untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Pasal 3

Partai Rakyat Merdeka berkedudukan di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

BAB II

Asas

Partai Rakyat Merdeka berasaskan Pancasila

BAB III

Identitas

Partai Rakyat Merdeka beridentitas Islam

BAB IV

Sifat

Partai Rakyat Merdeka bersifat kemahasiswaan, kekeluargaan dan inklusif.

BAB V

Tujuan Dan Usaha

Pasal 7

Tujuan

Terbentuknya pribadi yang mempunyai komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan loyal terhadap nilai-nilai universal kemanusiaan dalam perjuangan politik.

Pasal 8

1. Menghimpun mahasiswa progresif dan peka terhadap perubahan.
2. Memberikan pendidikan politik pada mahasiswa
3. Memberikan aksentuasi moralitas yang beradab terhadap kehidupan politik.

BAB VI

Keanggotaan

Pasal 9

Anggota Partai Rakyat Merdeka adalah mahasiswa strata satu IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.